

Judul : DPR ingatkan modus baru, pelaku ubah pola transaksi, perputaran dana judol 2025 menurun
Tanggal : Sabtu, 01 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Perputaran Dana Judol 2025 Menurun

DPR Ingatkan Modus Baru, Pelaku Ubah Pola Transaksi

Senayan menyoroti penurunan perputaran dana judi online (judol) di Indonesia sepanjang 2025. Kondisi itu tidak boleh membuat Pemerintah lengah karena pola kejahatan terus berkembang pesat. Pelaku semakin adaptif memanfaatkan ekosistem digital untuk melancarkan aksinya.

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, nilai perputaran dana judol pada 2025 sebesar Rp 286,84 triliun. Angka itu turun 20 persen dari tahun sebelumnya senilai Rp 359,81 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta menilai, catatan itu menunjukkan kemajuan pemberantasan judol lewat berbagai langkah Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). "Tren penurunan omzet transaksi judol jadi langkah awal positif meski perbaikan tetap dibutuhkan. Saya mengapresiasi Komdigi yang ada di garis depan penanganan," katanya, Jumat (31/7/2026).

Dia menegaskan, Pemerintah harus bekerja lebih sistematis serta disiplin dalam menghadapi

kejahatan siber. Aktivitas judol belum mereda. Jaringan pelaku justru mengubah pola transaksi jadi lebih sering, tersebar, dan bernominal kecil agar makin sulit dideteksi.

Menurutnya, penanganan judol tidak lagi cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs maupun aplikasi semata. Pemerintah harus memperkuat tata kelola ruang digital secara menyeluruh dan terpadu. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi berbagai modus baru yang terus digunakan oleh organisasi kejahatan digital.

Temuan PPATK mengenai perubahan pola operasi judol lewat instrumen digital menunjukkan tantangan negara telah melampaui persoalan konten ilegal. Masalah ini kini menyangkut kemampuan negara dalam men-



Sukamta

gendalikan ruang digital. "Pengendalian itu merupakan bagian utama dari kepentingan strategis nasional saat ini," jelasnya.

Sukamta juga mendorong Pemerintah menyusun kebijakan nasional pengamanan ruang digital terintegrasi. Kebijakan ini mencakup komunikasi digital, penyelenggaraan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan siber, serta tata kelola platform. Pendekatan itu mencegah ruang digital dimanfaatkan sebagai sarana berkembangnya

ekonomi ilegal di Tanah Air.

Selain itu, dia meminta Pemerintah mengevaluasi indikator keberhasilan transformasi digital nasional dari sisi penegakan hukum. Pemblokiran situs akan jauh lebih efektif bila dibarengi penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku. Langkah ini harus menyasar semua aktor utama di balik jaringan judol.

Sebelumnya, PPATK mencatat penurunan drastis perputaran dana judol serta nilai depositnya. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, hingga akhir 2025 perputaran dana tersisa Rp 286,84 triliun. Angka ini mengalami penurunan 20 persen dari catatan tahun 2024 sebesar Rp 359,81 triliun.

Penurunan transaksi ini mematahkan tren kenaikan perputaran dana judol sejak 2017. Saat itu nilai hanya Rp 2,01 triliun lalu melonjak pada 2024. Sementara nilai deposit menyusut jadi Rp 36,01 triliun pada 2025 dari Rp 51,3 triliun pada 2024. Penurunan itu jadi catatan bersejarah.

Meski begitu, aktivitas judol belum mereda sepenuhnya di masyarakat. Pada triwulan I 2026, nilai perputaran dana judol mencapai Rp 40,3 triliun dengan total deposit Rp 10,59 triliun. "Analisis PPATK menunjukkan pola transaksi kini makin sering, tersebar, serta bernominal kecil," beber Ivan.

PPATK menemukan pergeseran signifikan dalam metode deposit judi online. Sepanjang 2025, penggunaan QRIS mencapai 78,5 persen dari frekuensi deposit, yakni 305,35 juta transaksi senilai Rp 19,35 triliun. Deposit transfer bank dan dompet elektronik mencatat 83,79 juta transaksi atau 21,5 persen bernominal Rp 16,67 triliun.

Pergeseran itu makin terlihat pada triwulan I 2026 saat frekuensi deposit QRIS meningkat jadi 88,6 persen, sementara transfer rekening tinggal 11,4 persen. Penyalahgunaan instrumen pembayaran sah itu oleh jaringan judol menunjukkan keharusan penguatan proses verifikasi, penerimaan, serta pemantauan merchant secara berkelanjutan. ■ PYB